

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 kepada Tiga Belas Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam rangka memenuhi kewajibannya Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Rabu, 20 Mei 2020, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 kepada 13 Pemerintah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Pemerintah Kabupaten Seruyan. LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan LHP secara daring (*online*) melalui *video conference*. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan perwakilan pegawai masing-masing kabupaten. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili.

Dalam sambutannya, Bapak Ade Iwan Ruswana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2019 kepada 13 Pemerintah Kabupaten tersebut. Bapak Ade Iwan Ruswana memberikan selamat kepada 13 Pemerintah Kabupaten. BPK mendorong dan mengharapkan seluruh entitas tetap mempertahankan opini WTP pada tahun mendatang. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019, tanpa mengesampingkan beberapa perbaikan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan terjadi di beberapa Pemerintah Daerah, diantaranya

1. Penetapan BPHTB tidak sesuai ketentuan, diantaranya terkait penetapan NPOPTKP lebih dari satu kali untuk satu Wajib Pajak dalam satu tahun;
2. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkoordinasi dengan PLN terkait setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN;
3. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang cenderung merugi dan membebani keuangan daerah;

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



4. Rekening milik Pemerintah Daerah belum seluruhnya ditetapkan dengan Keputusan Kepada Daerah sehingga terdapat saldo rekening yang belum disajikan di dalam Laporan Keuangan;
5. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai;
  - a. Aset belum dikapitalisasi dan diatribusi ke aset induknya;
  - b. Terdapat aset tetap dengan nilai dibawah nilai kapitalisasi dan bernilai Rp0,00 atau Rp1,00;
  - c. Aset tetap tanah dibawah jalan belum sesuai dengan SK Kepala Daerah tentang Ruas Jalan;
  - d. Aset tetap dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak;
  - e. Data aset tetap dalam KIB tidak informatif.

BPK mengharapkan Pemerintah Daerah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2019. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp0,594 milyar, kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan Perangkat Daerah sebesar Rp33,942 milyar dan temuan kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp4,514 milyar, sehingga totalnya adalah sebesar Rp39,050 milyar. Atas temuan tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp16,522 milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp22,528 milyar, kami mengharapkan dapat disetorkan ke Kas Negara/Daerah pada saat pemantauan tindak lanjut nanti.

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**